

PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL (Tantangan dan Relevansinya di Indonesia)

Oleh: Supriadi*

Abstrak

Pendidikan Islam multikultural adalah peluang di tengah tantangan kondisi sosial masyarakat yang plural. Relevansi pendidikan ini bagi situasi sosial akan menjadi perekat kondusifitas bangsa agar rakyatnya dapat hidup berdampingan dalam keragaman dan perbedaan kultur, hidup dengan damai, saling menghormati, saling mencintai dan berkasih sayang, empati pada orang lain, dapat mengeliminir perselisihan dan konflik. Sehingga dengan demikian Pendidikan Agama Islam menjadi rahmat, ajaran yang agung, penyejuk bagi kehidupan sosial, dapat diinternalisasikan dalam proses transformasi nilai-nilai masyarakat dan bangsa yang beragam, sehingga melahirkan kekuatan yang resensial serta alat pemersatu bangsa yang kokoh, dan semakin diminati oleh masyarakat yang kompleks di tengah derasnya arus perubahan.

Kata-kata Kunci: *Pendidikan Islam, Multikutralisme, Pluralisme Masyarakat.*

A. Pendahuluan

Salah satu isu penting yang mengiringi gelombang demokratisasi adalah munculnya wacana multikulturalisme. Multikulturalisme pada intinya adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Multikulturalisme memberi penegasan seseorang atau kelompok bahwa dengan segala perbedaannya diakui dan sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas yang berbeda saja tidak cukup, karena yang terpenting adalah komunitas tersebut diperlakukan sama oleh warga negara maupun negara.

Multikulturalisme adalah pengakuan pluralisme budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok-kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya kelompok-kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka diakui (Haryatmoko, 2006: 1). Fokus kepedulian diarahkan pada kelompok etnis, kelompok minoritas termasuk perempuan. Multikulturalisme terumus dalam bentuk “sejumlah prinsip, kebijakan dan praksis untuk

*Dosen Tetap Fakultas Agama Islam UNIKARTA Tenggarong, Kalimantan Timur

mengakomodasi keberagaman sebagai bagian yang sah dan tak terpisahkan dari suatu masyarakat”. Jadi, arah multikulturalisme lebih menuju pada upaya untuk menciptakan, menjamin dan mendorong pembentukan ruang publik yang memungkinkan beragam komunitas bisa tumbuh dan berkembang disesuaikan dengan kemampuan jangkauan langkah masing-masing.

Multikulturalisme menjadi penting di Indonesia karena Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai suku bangsa. Adanya penindasan atau penafian atas dasar kepemilikan etnis, agama atau bentuk minoritas lainnya menjadi dikotomi yang memisahkan antar “kita” (kelompok dominan) dan “mereka” (di luar kelompok dominan) yang dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari posisi kekuasaan. Pelembagaan diskriminasi ini terjadi di wilayah-wilayah penting dalam kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan-jabatan publik, dan hubungan-hubungan sosial lain. Berikutnya, istilah minoritas sengaja dipakai secara sistematis untuk memojokkan ke posisi marginal atau memberi label *tidak bernilai penting* dalam hubungan dengan kekuatan politik yang dominan. Dengan demikian perasaan rendah diri dan tak berdaya semakin mendalam terbatinkan. Selain itu, diskriminasi terhadap kaum imigran semakin membuat mereka terpinggirkan dari pengambilan keputusan. Oleh karena itu semangat multikultural di Indonesia dalam bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) mau tidak mau harus menjawab kebutuhan dasar kelompok-kelompok minoritas untuk mengembangkan identitas budaya dan penghargaan diri.

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang memberikan penekanan terhadap proses penanaman cara hidup yang saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya hidup di tengah-tengah masyarakat dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Dalam konteks Indonesia yang sarat dengan kemajemukan, pendidikan ini memiliki peran yang sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif (Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, 2008: 191). Dalam konteks pendidikan multikultural inilah maka diperlukan upaya untuk menerapkan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berbasis, berwawasan atau berparadigma multikultural sehingga dapat menghadirkan konsep pendidikan Islam yang akomodatif dan mampu menyesuaikan atau mengharmonisasi *diversity* (keragaman) budaya yang dapat dikreasi sebagai aset kekayaan bangsa, bukan ancaman keutuhan (*unity*). Konsep pemahaman terhadap PAI yang selama ini belum dilakukan secara *kaffah* (menyeluruh) atau utuh yang meliputi aqidah, ibadah, muamalah dan sejarah perlu diarahkan ke arah ini agar PAI itu benar-benar dipahami secara universal, agar tidak berakibat timbulnya sikap eksklusifisme dan fanatisme yang berlebihan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.

Pendidikan Islam multikultural adalah peluang di tengah tantangan kondisi sosial masyarakat yang plural. Relevansi pendidikan ini bagi situasi sosial akan menjadi perekat kondusifitas bangsa agar rakyatnya dapat hidup berdampingan dalam keragaman dan perbedaan kultur, hidup dengan damai,

saling menghormati, saling mencintai dan berkasih sayang, empati pada orang lain, dapat mengeliminir perselisihan dan konflik. Sehingga dengan demikian PAI menjadi rahmat, ajaran yang agung, penyejuk bagi kehidupan sosial, dapat diinternalisasikan dalam proses transformasi nilai-nilai masyarakat dan bangsa yang beragam, sehingga melahirkan kekuatan yang resensial serta alat pemersatu bangsa yang kokoh, dan semakin diminati oleh masyarakat yang kompleks di tengah derasnya arus perubahan.

B. Pengertian Multikultural

Ada beberapa istilah yang secara konseptual tampak mirip dengan terminologi multikultural namun sebenarnya berbeda, misalnya pluralisme, diversitas, heterogenitas, atau yang sering pula disebut dengan istilah “masyarakat majemuk”. Masyarakat majemuk (*plural society*) berbeda dengan keragaman budaya atau multikulturalisme (*plural cultural*). Masyarakat majemuk lebih menekankan soal etnisitas atau suku, yang pada gilirannya membangkitkan gerakan etnosentrisme dan etnonasionalisme. Sifatnya sangat askriptif dan primordial. Bahaya *chauvenisme* sangat potensial tumbuh dan berkembang dalam masyarakat model ini. Karena wataknya yang sangat mengagungkan ciri streatif kesukuan, maka anggota masyarakat ini memandang kelompok lain dengan cara pandang mereka yang rasial dan primordial. Model masyarakat ini sangat rentan dengan konflik. Dengan kata lain, konflik yang mereka miliki dapat terjadi setiap saat.

Berbeda dengan konsep dan perspektif masyarakat majemuk, konsep multikultural sangat menjunjung perbedaan bahkan menjaganya agar tetap hidup dan berkembang secara dinamis. Lebih dari sekadar memelihara dan mengambil manfaat dari perbedaan, perspektif multikulturalisme memandang hakikat kemanusiaan sebagai sesuatu yang universal. Manusia adalah sama. Bagi masyarakat multikultural perbedaan merupakan sebuah kesempatan untuk memanifestasikan hakikat sosial manusia dengan dialog dan komunikasi.

Karakter masyarakat multikultural adalah toleran. Mereka hidup dalam semangat *peaceful co-existence*, hidup berdampingan secara damai. Setiap entitas sosial dan budaya masih membawa jati dirinya, tidak terlebur kemudian hilang, namun juga tidak diperlihatkan sebagai kebanggaan melebihi penghargaan terhadap entitas lain. Dalam perspektif multikultural, baik individu maupun kelompok dari berbagai etnik dan budaya hidup dalam *societal cohesion* tanpa kehilangan identitas etnik dan kultur mereka. Sekalipun mereka hidup bersatu dalam ranah sosial tetapi antar-entitas tetap ada jarak. Prinsip “aku dapat bersatu dengan engkau, tetapi antara kita berdua tetap ada jarak” sangat kuat dalam masyarakat multikultural. “Aku hanya bisa menjadi aku dalam arti sepenuhnya dengan menjadi satu dengan engkau, namun tetap saja antara aku dan engkau *ada jarak*”, merupakan prinsip lain pada masyarakat multikultur. Untuk menjaga jarak sosial tersebut tetap kondusif diperlukan jalinan komunikasi, dialog dan toleransi yang kreatif.

C. Konsep Pendidikan Islam Multikultural

Istilah multikultur atau multikultural awalnya merujuk kepada istilah *multiculturalism* yang dalam konteks negara Kanada (di mana istilah ini pertama kali dipopulerkan tahun 1950-an) digunakan sebagai sinonim dari *pluralism* (kemajemukan) dan *diversity* (keanekaragaman). Majemuk yang dimaksud di sini adalah kemajemukan yang bersifat horizontal, yakni (adanya berbagai macam suku, bangsa, etnis, bahasa, agama, adat-istiadat, dan lain-lain), maupun vertikal, yakni (adanya berbagai kelompok masyarakat yang dapat dipilah-pilah atas dasar *mode of production*, yang bermuara pada perbedaan daya adaptasinya. Sedangkan keanekaragaman adalah keberagaman dan saling menerima perbedaan bahkan saling melengkapi, saling menghargai. Secara sederhana multi berarti banyak, ragam, atau aneka, kultur berarti kebudayaan. Multikultural berarti banyak, keragaman, atau aneka kebudayaan, yang harus dihargai dan dihormati serta dijunjung tinggi.

Pendidikan multikultural menurut Amir Rusdi (2007: 2) dimaknai sebagai usaha-usaha edukatif yang diarahkan untuk dapat menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada peserta didik dalam lingkungan yang berbeda baik ras, etnik, agama, budaya, nilai-nilai, dan eteologi sehingga memiliki kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam perbedaan dan memiliki kesadaran untuk hidup berdampingan secara damai. Menurut Azyumardi Azra (2004: 89) pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan interkultural, diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok manusia seperti; toleransi, perbedaan etno-kultural dan agama, diskriminasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal serta subjek-subjek lain yang relevan. Pada buku lain Azyumardi Azra (2007: 13) mengatakan pula multikulturalisme ialah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya. Begitu pula Dede Rosyada (2005: 21-22) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat.

Sedangkan muatan nilai-nilai multikultural dalam pendidikan Islam menurut Abd. Rachman Assegaf (2011: 313) dapat disimpulkan menjadi 3 kategori yakni:

1. Kategori nilai-nilai utama terdiri dari:
 - a. *Tauhid*, mengesakan Tuhan.
 - b. *Ummah*, hidup bersama.
 - c. *Rahmah*, kasih sayang.
 - d. *Al-musawah*, taqwa (egalitarianism).

2. Kategori Penerapan:
 - a. *Ta'aruf, Ihsan*, saling mengenal dan berbuat baik,
 - b. *Tafahum*, saling memahami.
 - c. *Takrim*, saling menghormati.
 - d. *Fastabiqul khairat*, berlomba dalam kebaikan.
 - e. *Amanah*, saling memercaya.
 - f. *Husnuzhan*, berpikir positif.
 - g. *Tasamuh*, toleransi.
 - h. *'Afw, Maghfirah*, pemberian/permohonan ampunan.
 - i. *Sulh*, perdamaian atau rekonsiliasi.
 - j. *Islah* atau resolusi konflik.
3. Kategori Tujuan:
 - a. *Silah*, salam atau perdamaian.
 - b. *Layyin*, lemah lembut atau budaya anti kekerasan.
 - c. *'Adl* atau keadilan dan jujur.

Di samping itu materi PAI berwawasan multikultural yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Islam inti ajarannya adalah kasih dan kedamaian yang agung, ucapan *assalamu'alaikum* (kedamaian bagi kalian semua). Kata *salam* (damai) sebagai salah satu nama Tuhan (Q.S.Al-Hasyr [59]: 23). Mereka yang menginginkan ridha Tuhan hendaknya mengikuti “jalan damai”(Q.S. An-Nahl [16]: 5). Surga yang diidamkan oleh semua orang juga disebut dengan nama “rumah kedamaian (*dar al-Salam*)” (Q.S.Al-Fajr [89]: 30). Allah mengucapkan salam perdamaian, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang (Q.S.Yaa siin [36]: 56). Inti kedamaian yakni kesadaran bahwa setiap amalan yang bersifat vertikal (*hablum minallah*) seharusnya diimplikasi pada tegaknya nilai-nilai horizontal-kemanusiaan (*hablum minannas*), agar terhindar dari kehinaan (Q.S. Ali Imran [3]: 112). Sebaliknya Tuhan tidak menyukai kerusakan (*fasad*) dan kekerasan, dan kebrutalan, yaitu tindakan yang mengakibatkan gangguan sistem sosial, menyebabkan hilangnya jiwa dan harta (Q.S. Al-Baqarah [2]: 205).
2. Islam mengakui kemajemukan agama maupun multikultural, maka tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256). Metode penyebarannya lebih menggunakan pendekatan persuasif. Memang Tuhan menghendaki agar manusia dapat berkompetisi dalam keimanan (Q.S. Yunus[10]: 99), maka ditetapkan beberapa syariat yang (harus) mereka amalkan (Q.S.Al-Hajj [22]: 67), Allah akan menilai siapa diantara mereka yang lebih baik (Q.S.Fush Shilat [41]: 33). Mereka tidak boleh menganggap bahwa paham (agamanya) saja yang paling benar, hal itu berarti termasuk dalam kategori mengejek paham (agama) lain. Allah tidak menjadikan manusia satu umat saja (Q.S. Hud [11]: 118), melainkan menakdirkan adanya berbagai suku dan bangsa (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13). Perbedaan manusia dalam bahasa dan warna kulit harus diterima sebagai

sebuah kenyataan positif (Q.S. Ar-Rum [30]: 22). Perbedaan tidak perlu digusarkan dalam hidup, dan hendaklah dipergunakan sebagai pangkal tolak berbuat kebajikan. Dengan demikian Islam sama sekali tidak menafikan agama-agama dan umat serta budaya-budaya yang ada, bahkan Islam mengakui eksistensi agama-agama lain dan tidak menolak nilai-nilai ajarannya.

3. Islam merupakan agama yang yang diperintahkan supaya berbuat baik dan menegakkan keadilan meskipun kepada non muslim (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 60), maka dengan demikian tidak boleh berlaku zhalim, subjektif, atau bertindak sewenang-wenang. Islam sangat mengedepankan hidup bertoleransi/tasamuh (Q.S. Al-Kafirun [109] : 1-6, Yunus [10]: 40-41, Al-Kahfi [18]: 29). Dia telah menciptakan manusia bukan dalam keseragaman, tetapi dalam keragaman dan perbedaan baik suku, bangsa, bahasa, warna kulit, agama dan keyakinan (Q. S. Ali Imran [3]: 64, Al-Hujurat [49]: 13, dan Yunus [10]: 67). Terhadap keragaman tidak boleh berprasangka serta mencurigai (Q.S. Al-Hujurat [49]:15). Dan seharusnya menghargai orang lain (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13). Serta senang memaafkan orang lain baik diminta ataupun tidak (Q.S. Al-A'raf [7]: 199, Al-An'am [6]: 54, dan Ali Imran [3]:134).

D. Tantangan Pendidikan Islam Multikultural

Mengapa Pendidikan Islam Multikultural menjadi penting? Menurut hemat penulis setidaknya terdapat 4 tantangan yang melatarbelakanginya, yakni: Pertama, konsep pemahaman terhadap PAI belum dilakukan secara *kaffah* (menyeluruh) atau utuh yang meliputi aqidah, ibadah, muamalah dan sejarah. Pemahaman belum bersifat universal, akibatnya timbul sikap eksklusifisme, fanatisme yang berlebihan dan apologis.

Kedua, ruang lingkup yang berhubungan dengan tujuan hanya mementingkan hubungan vertikal antara makhluk dengan Sang Khalik, yang berkuat pada masalah ritual semata, nilai transendental, bernuansa era klasik-skolastik. Sebaliknya mengabaikan kualifikasi dan visi global, agar Islam senantiasa *compatible* dengan perkembangan masyarakat dalam bentuk hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, termasuk hubungan manusia dengan diri dan dengan alam semesta.

Ketiga, dalam pelaksanaan PAI lebih terkonsentrasi pada persoalan teoritis sekadar menguasai materi, sebatas hafalan-hafalan teks, *ta'lim*, bersifat formalitas tanpa pemaknaan dengan realitas. Model pendidikan yang menekankan indoktrinasi, memperkaya wilayah kognitif, mengabaikan afektif dan psikomotor, tidak menyeimbangkan tiga aspek sekaligus, yaitu iman, ilmu dan amal. Kurang pada pencerahan hati dan kecerdasan emosional, wawasan aqidah ruhiyah dan moral yang membutuhkan perenungan dan penghayatan secara mendalam. Padahal dari nilai-nilai moral inilah yang akan melahirkan kasih sayang, rasa cinta, tolong menolong, toleransi, tenggang rasa,

menghormati perbedaan, persaudaraan manusia dan lain. Metode yang digunakan dalam pembelajaran pada umumnya adalah metode konvensional dengan metode ceramah sebagai andalan, sehingga terasa membosankan dan menjemukan.

Dan Keempat, kurikulum PAI yang diterapkan selama ini pada umumnya model *separated subjek curriculum* (kurikulum terpisah), masih parsial, konservatif, belum memuat nilai-nilai sakral dan etnik yang ada. Dengan demikian sulit untuk diintegrasikan dengan mata kuliah lain semacam islamisasi mata kuliah. Di samping itu juga belum merespon perkembangan zaman dan kemajuan iptek, tema-tema aktual, isu-isu kontemporer, kebutuhan masyarakat lokal, nasional, regional dan global. Arah kurikulum dan silabus belum berorientasi pada kebersamaan, perdamaian, toleransi dalam menerima segala macam keragaman, inklusivitas berpikir, pluralisme budaya untuk mencipta “masyarakat manusia berbudaya”, dapat membangun kebersamaan dalam keragaman, dan hormat menghormati atas kebebasan berbudaya dan beragama. Materi yang diberikan terlalu menekankan pada aspek normatif, ritualistik dan eskatologis. Cenderung menekankan pada ibadah formal, kurang pada penghayatan dalam kenyataan. Belum ditekankan pada materi akan pentingnya menghargai keanekaragaman budaya, terutama PAI yang berbasis multikultural.

Tatkala menganalisa persoalan di atas, inti penyebabnya adalah karena masyarakat yang heterogenitas, yang kaya dengan keanekaragaman budaya, maupun agama, sedangkan di antara mereka saling berupaya mendominasi, banyak identitas, berbeda ideologi dan paham kepentingan serta kebutuhan, memiliki geng masing-masing, dan menganggap budaya dan agamanyalah yang benar. Sehingga penting untuk menyelenggarakan pendidikan multikultural yang berdasarkan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya. Salah satunya melalui PAI yang direformulasi menjadi PAI berbasis multikultural.

Namun pemasalahannya, dengan perubahan sosial (*sosial change*) yang cepat pada masyarakat maka tidak cukup dengan memberikan kurikulum pada materi PAI secara konvensional, tetapi harus mereformasi baik kurikulum, isi materi, pelaksanaan pembelajaran, model pembelajaran, strategi, pendekatan, dan metode, serta berupaya agar dapat berfungsi sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan kebudayaan saat ini dan masa mendatang.

Secara umum pendidikan agama Islam selama ini belum dilakukan secara kaffah (menyeluruh) atau utuh yang bersifat universal meliputi aqidah, ibadah, muamalah dan sejarah. Akibatnya timbul sikap eksklusifisme, fanatisme yang berlebihan dan apologis. Pada aspek tujuannya lebih mengutamakan hubungan manusia dengan Allah SWT dalam bentuk ibadah ritual dan mengabaikan hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bentuk ibadah sosial/muamalah. Lebih mengutamakan keselamatan individual, wilayah privat dari pada keselamatan kelompok/sosial, wilayah publik atau isu-

isu umum secara global. Lebih mengutamakan kesalehan secara individual dari pada kesalehan sosial. Dengan demikian tidak fleksibel dengan perkembangan zaman.

Dalam pelaksanaan pembelajaran PAI di Indonesia selama ini lebih terkonsentrasi pada persoalan teoritis, sebatas hafalan-hafalan teks, cenderung memprioritas pada ranah kognitif hanya berkuat pada transfer ilmu semata, dan mengabaikan internalisasi nilai, pembinaan aspek afektif dan konatif-volutif, yakni kemauan, penghayatan nyata dan tekad untuk mengamalkannya. Model pengajaran hanya bertumpu pada aktivitas guru (*teacher centries*), kurang diimbangi dengan pengajaran yang menggerakkan dan melibatkan siswa secara aktif (*student centries*). Dalam pelaksanaannya sudah banyak dipengaruhi oleh *trend Barat* yang mengutamakan pengajaran dari pada pendidikan moral, padahal inti dari pendidikan agama adalah pendidikan moral. Di samping itu juga melakukan reorientasi filosofis-paradigmatik tentang bagaimana memunculkan kesadaran siswa agar belajar inovatif, kreatif, mandiri, dan kerja sama, berorientasi kepada produktifitas, efektifitas, dan efesiansi, serta berwajah inklusif, toleran, tanpa membedakan identitas individu dalam kelompok belajar.

Model penyelenggaraan pendidikan multikultur di sekolah dapat dilakukan dengan cara terintegrasi dalam mata pelajaran pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan multikultur ini diharapkan tidak merubah struktur kurikulum dan tidak menambah alokasi waktu. Penerapan atau pengintegrasian pendidikan multikultur secara jelas terlihat dalam silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Melalui cara itu, maka akan terimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas secara kontekstual. Selain itu, pendidikan multikultur juga bukan mata pelajaran terpisah sehingga harus terintegrasi dan bukan merupakan pengetahuan yang bersifat kognitif sehingga materi seyogyanya dikemas dalam bentuk afektif dan kinerja siswa serta pendekatan materinya dapat bersifat tematis. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah upaya menerapkan atau mengintegrasikan muatan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan multikultur kedalam mata pelajaran melalui kegiatankegiatan sehingga dapat diterapkan dan tercermin dalam kehidupan peserta didik. Selain itu, penerapan atau pengintegrasian pendidikan multikultur harus dilakukan dan terlihat dalam aktivitas seluruh warga sekolah maupun dalam manajemen sekolah secara umum (Puskur Depdiknas, 2007: 12).

Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu: pertama, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Kedua, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat pendidikan dwi-budaya. Kelima, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia

(Muhaemin el Ma'hady, <http://artikelpendidikan.net/multikulturalisme-dan-pendidikan-multikultural.php> diunduh tanggal 20 Desember 2014) .

Hal-hal yang patut dikembangkan dalam menentukan model multikulturalisme di Indonesia adalah adanya keanekaragaman etnik, budaya, agama, ekonomi, sosial, dan gender. Selain itu, dari segi geografis wilayah Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena wilayah dan pulaunya yang terpencar-pencar dan bervariasi, yang berbeda dengan kondisinya dengan negara lain. Dengan pendekatan multikultural ini, fenomena negatif yang ada di masyarakat seperti deskriminasi, stereotip, dominasi, ketidakadilan, ketimpangan dan prasangka buruk dapat dikurangi, sehingga masyarakat yang berkeadilan, berkeselarasan, berkemitraan dan bertoleransi dapat segera terwujud di Indonesia.

Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2008: 198) menjelaskan bahwa dalam pengembangannya, kurikulum dengan menggunakan pendekatan multikultural harus didasarkan pada prinsip: (1) keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya setempat, (2) keragaman budaya menjadi dasar dalam pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti juaan, konten, proses, dan evaluasi, (3) budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar anak didik, (4) kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.

Ada beberapa tahapan yang diperhatikan dalam pengembangan kurikulum berbasis pendidikan multikultural (Puskur Depdiknas, 2007: 14 - 18), yakni:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan sekolah, dan pengembangan diri yang mencerminkan kurikulum sekolah yang berbasis multikultur.
2. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Yang Bermuatan Multikultur, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Urgensi dengan kehidupan peserta didik yang berhubungan dengan multikultur;
 - b. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran lain yang memuat multikultur;
 - c. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dalam masyarakat yang multikultur;
 - d. Keterpakaian atau kebermaknaan bagi peserta didik dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.
3. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran Yang Bermuatan Multikultur, dengan mempertimbangkan:
 - a. Keberagaman peserta didik;
 - b. Karakteristik mata pelajaran;
 - c. Relevansi dengan karakteristik daerah;
 - d. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik;

- e. Kebermanfaatan bagi peserta didik;
 - f. Aktualitas materi pembelajaran; dan
 - g. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan.
4. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran Yang Bermuatan Multikultur. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran inkuiri dan berpusat pada peserta didik dan dengan menerapkan beberapa metode yang relevan seperti metode diskusi, tanya jawab, bermain peran, penugasan, dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memuat multikultur adalah sebagai berikut:
- a. Kegiatan pembelajaran multikultur disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik (guru), agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
 - b. Kegiatan pembelajaran multikultur memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik.
 - c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan materi pembelajaran muatan multikultur.
 - d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran yang bermuatan multikultur minimal mengandung dua unsur yaitu kegiatan peserta didik dan materi multikultur.
5. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi Yang Bermuatan Multikultur. Indikator yang bermuatan multikultur merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bermuatan multikultur. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, lingkungan dan potensi daerah yang dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.
6. Penentuan Jenis Penilaian Yang Bermuatan Multikultur Penilaian pencapaian kompetensi dasar yang bermuatan multikultur bagi peserta didik dilakukan berdasarkan indikator yang bermuatan multikultur. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Penilaian yang bermuatan multikultur merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

7. Menentukan Sumber Belajar Yang Bermuatan Multikultur Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang bermuatan multikultur digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar yang bermuatan multikultur didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

E. Relevansi Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia

Konsep masyarakat multikultural tampaknya relevan bagi penegasan kembali identitas nasional bangsa Indonesia yang inklusif dan toleran dengan tetap mengakar pada identitasnya yang majemuk sebagaimana terefleksi dalam konsep dasar negara Pancasila. Dengan demikian, konsep masyarakat multikultural dapat menjadi wadah pengembangan demokrasi di Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat menjadi modal sosial (*social capital*) bagi pengembangan masyarakat multicultural di Indonesia. Motto “Bhineka Tunggal Ika” yang tercantum dalam lambang negara kita sangat tepat dalam menggambarkan realita yang ada. Data secara antropologis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang memiliki keragaman sosial dan budaya. Kelompok-kelompok budaya besar seperti Aceh, Batak, Minangkabau, Dayak, Jawa, Bugis-Makasar, Ambon, Papua dan lain-lain adalah contoh dari keberagaman tersebut. Belum lagi kelompok-kelompok budaya yang relatif lebih kecil dibanding dengan kelompok pendukung kebudayaan sebelumnya. Dalam realita yang seperti ini maka pendidikan multikultur merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.

Upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila; Pertama, konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami oleh masyarakat Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional untuk mengadopsi dan menjadikan sebagai pedoman. Kedua, kesamaan pemahaman di antara masyarakat mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep yang mendukungnya.

Selanjutnya, jika melihat hubungan antara Pancasila dan multikulturalisme terdapat 5 hal penting, yaitu :

Pertama, multikulturalisme adalah pandangan kebudayaan yang berorientasi praktis, yakni yang menekankan perwujudan ide menjadi tindakan. Ciri inilah yang memberikan kata sambung dengan Pancasila yang seyogyanya dipandang sebagai cita-cita. Multikulturalisme menghendaki proses belajar mengenai perbedaan kebudayaan yang dimulai dari sikap dan interaksi antar kebudayaan. Dengan kata lain, multikulturalisme dapat juga disebut sebagai penerjemahan Pancasila ke dalam konteks yang lebih konkret dan praktis.

Kedua, multikulturalisme harus menjadi *grand strategy* ke masa depan, khususnya dalam pendidikan nasional yang menekankan *learning by doing or practicing* dan tidak lagi semata-mata kognitif. Untuk itu dibutuhkan pemikiran

yang komprehensif, konsisten, dan berjangka panjang yang melibatkan semua pihak.

Ketiga, dengan memosisikan multikulturalisme sebagai perwujudan Pancasila, maka kebudayaan tidak lagi dijadikan sampiran atau embel-embel saja, atau dijadikan kambing hitam jika terjadi pergolakan di masyarakat, melainkan dijadikan salah satu prioritas utama untuk membangun bangsa karena integrasi bangsa bertumpu pada persoalan kebudayaan.

Keempat, kalau multikulturalisme didefenisikan sebagai “sejumlah kebudayaan yang hidup berdampingan, dan seyogianya mengembangkan cara pandang yang mengakui dan menghargai keberadaan kebudayaan satu sama lain”, maka secara empiris dapat dipertanyakan apakah kriteria “saling menghargai” itu ada dalam masyarakat.

Kelima, perubahan dari cara berpikir pluralisme ke multikulturalisme dalam memandang Pancasila adalah perubahan kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai dasar yang tidak mudah diwujudkan. Diperlukan dua persyaratan yaitu: (1) kita harus mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai model multikulturalisme yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia; dan (2) kebijakan itu harus berjangka panjang, konsisten, dan membutuhkan kondisi politik yang mendukung.

Pendidikan Islam berbasis multikultural dengan model pendidikan mengedepankan pluralisme agama atau toleransi agama (*religious tolerance*), keadilan, saling menghargai perbedaan (*agree in disagreement*), dapat hidup saling berdampingan satu dengan yang lain (*to live together*), dapat menciptakan kesejukan dan kenyamanan (*antihegemoni* dan *antidominasi*). Persaudaraan antar sesama agama (*ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan antar sesama bangsa (*ukhwah wathaniyah*) dan persaudaraan antar sesama manusia (*ukhwah basyariyah*), serta globalisasi pendidikan Islam yang arif dan bijaksana. Kalau Pendidikan Agama Islam menjadi anti-global, bersikap eksklusif atau menutup diri ia akan ketinggalan zaman, sebaliknya jika membuka diri tapi tidak dicerna dengan arif, dapat merusak identitas atau kehilangan jati diri. Jadi globalisasi bisa menjelma menjadi peluang (*opportunity*), bisa pula menjadi tantangan (*threat*). Maka dalam menghadapi hal ini, pendidikan agama Islam berupaya menarik-alur arus global, yang sesuai ditarik atau diambil dan dicerna, sementara yang tidak sesuai, diulur, dilepas atau ditinggalkan.

Fenomena tersebut di atas mendeskripsikan kondisi pendidikan agama Islam yang dilaksanakan selama ini belum dapat merespons kondisi masyarakat yang selalu berubah atau yang sangat dinamis terutama isu-isu terkini yang dihadapi pendidikan Islam, yaitu pendidikan multikultural (keanekaragaman kultur). Hal ini sangat mendesak untuk dikaji, dicari solusi dan direspons dengan positif, terutama melalui muatan kurikulum PAI itu sendiri untuk dilakukan perubahan dan perbaikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau inovasi kurikulum yang bermuatan multikultural.

F. Kesimpulan

Sebagai bangsa heterogen atau majemuk, multikulturalisme menjadi sangat penting dikembangkan maka program-program multikultural senantiasa diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman dan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat agar tumbuh simpati terhadap perjuangan multikultural tersebut.

Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: Pertama, multikulturalisme perlu menjadi bagian kurikulum pendidikan. Dimensi multikultural harus tercermin di dalam pelajaran kewarganegaraan, geografi, sastra, sejarah, politik dan ekonomi. Pendidikan agama dan moral perlu memperkenalkan realita pluralitas, tanpa mereduksi ke dalam relativisme. Akan lebih baik bila pemeluk agama yang bersangkutan yang memberi penjelasan. Kedua, di dalam ruang publik, dimensi multikultural perlu mendapat dorongan, selain dalam bentuk politik, juga dalam ekspresi seni, teater, musik dan film. Ketiga, perlu dikembangkan program yang memungkinkan dijaminnya representasi minoritas di dalam politik, pendidikan dan lapangan kerja. Keempat, pemerintah perlu mendorong pengelola media massa seperti radio, televisi, koran, majalah dan internet agar memperhatikan dan mempunyai kepedulian multikultural. Bentuk-bentuk kreativitas lain diperlukan untuk mengintensifkan perjumpaan dan dialog.

Kebijakan multikultural biasanya mengusik keamanan kelompok mayoritas yang sudah menikmati *privilese* sebagai kelompok dominant. Penyebabnya ialah bahwa multikulturalisme mempunyai implikasi terhadap masalah representasi politik, budaya, lapangan kerja dan pendidikan. Maka reaksi pertama biasanya akan mendiskualifikasinya sebagai gagasan yang mau mempertahankan hegemoni dan kepentingan-kepentingan serta para pendukung mereka. Pemahaman bahwa kelompok-kelompok budaya dan minoritas yang kuat akan mampu memberdayakan *civil society* tidak masuk dalam perspektif para penentang multikulturalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Abd. Rachman. *Filsafat Pendidikan Islam, Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonetif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta; 2011.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Agama Multikultural*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta; 2004.
- , *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Impulse dan Kanisius. Yogyakarta; 2007.
- El Ma'hady, Muhaemin. <http://artikelpendidikan.net/multikulturalisme-dan-pendidikan-multikultural.php> diunduh tanggal 20 Desember 2014.
- Haryatmoko. *Multikulturalisme dan Landasan Etikanya Menimba Pendasaran Etika dari Altruisme dan Tindakan Komunikatif*. PSB-PS UMS. Surakarta; 2006.
- Naim, Ngainun dan Achmad Sauqi. *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta; 2008.
- Pusat Kurikulum Depdiknas. *Model Penerapan Pendidikan Multikultur Pada Jenjang Pendidikan Menengah*. Puskur Balitbang Depdiknas. Jakarta; 2007.
- Rosyada, Dede. *Pendidikan Multikultural melalui Pendidikan Agama Islam dalam Didaktika Islamika: Jurnal Kependidikan, Keislaman dan Kebudayaan*, Vol. VI, Nomor 1, Januari; 2005.
- Rusdi, Amir. *Perspektif Islam tentang Keberagaman dan Penyikapannya dalam Konteks Pengembangan Kurikulum PAI dalam Conciencia*, Vol.1 No.2;. 2007.